



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN JANUARI 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JANUARI TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon dan Email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Januari 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Januari Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, 01 Februari 2018

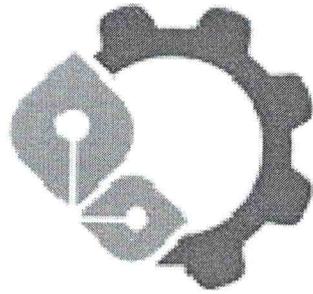


Kepala BPPSI

Krus Haryanto

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN FEBRUARI 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN FEBRUARI TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon dan Email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Februari 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Februari Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, 1 Maret 2018

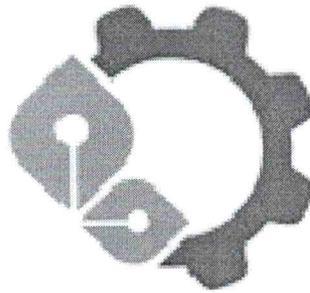
Kepala BPPSI



Krus Haryanto

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN MARET 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MARET TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon dan Email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Maret 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Maret Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

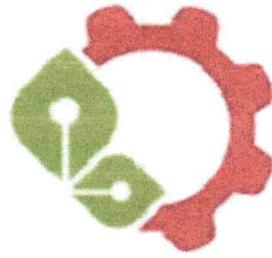
Pekanbaru, 2 April 2018
Kepala BPSI



[Handwritten Signature]
Krus Haryanto

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN APRIL 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN APRIL TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon dan Email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan April 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan April Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, 2 Mei 2018

An. Kepala,
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha




FEBRI GUSWANDI

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN MEI 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MEI TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon dan Email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Mei 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Mei Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, 05 Juni 2018

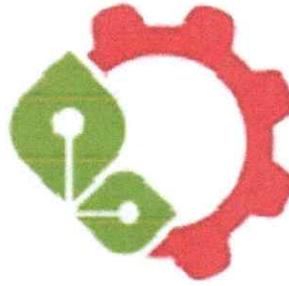
Kepala BPPSI

Krus Haryanto



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN JUNI 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JUNI TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon dan Email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Juni 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Juni Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, 02 Juli 2018

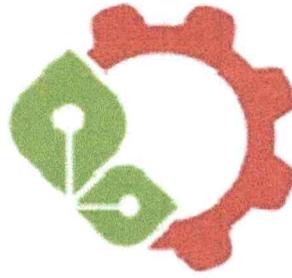
Kepala BPPSI



Krus Haryanto

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN JULI 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JULI TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon dan Email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Juli 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Juli Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, 02 Agustus 2018



Kepala BPPSI

Krus Haryanto

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN AGUSTUS 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN AGUSTUS TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon dan Email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Agustus 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Agustus Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, 03 September 2018

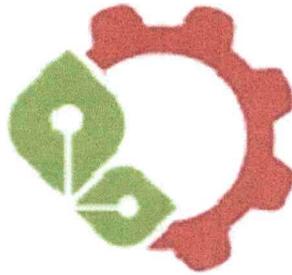
Kepala BPSI

Kris Haryanto



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru **sudah terdapat sarana pengaduan** berupa telepon dan email yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan September 2018 **tidak ada pengaduan** masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut di atas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru selama Bulan September Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, 10 Oktober 2018



Kepala BPPSI


Fathullah

▪ **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN OKTOBER 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN OKTOBER 2018**

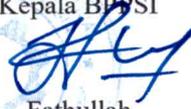
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Oktober 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Oktober Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, November 2018

Kepala BPPSI

Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN NOVEMBER 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN NOVEMBER 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan November 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan November Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Desember 2018

Kepala BPSI



Fathullah



- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI ENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN DESEMBER 2018**



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN DESEMBER 2018**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Desember 2018 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Desember Tahun 2018. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Januari 2019



Kepala BPSI



Fathullah

- **Tindak Lanjut Evaluasi Terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat**

- Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke BPPSI Pekanbaru.